

Deportasi Terhadap Warga Amerika Serikat Penduduk Chagossia Ditinjau dari Persepektif Hukum Pidana Internasional

Lutfiah Fitri Yani

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa

Korespondensi penulis: Lutfiahfitriyani3@gmail.com

Regina Eka Anggraeni

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa

E-mail: Reginaekaanggraeni02@gmail.com

Abstract. *This journal article was created with the aim of knowing the conditions and how the deportation carried out by the United States against the population of Chagossia will be viewed from the perspective of International Criminal Law, then what is the perspective of International Criminal Law in the case of the United States' deportation of the population of Chagossia. In fact, deportation itself is widely known to the public, at least to certain groups of people, especially legal experts. It is written in article 1 number 36 in Law no. 6 of 2011 concerning Immigration, which essentially refers to deportation, is a forced action to remove a foreigner from the territory of a country for the reason that the foreigner is not wanted in its territory by the country concerned.*

Keywords: *Deportation, Chagossia, International Criminal Law*

Abstrak. Artikel jurnal ini dibuat bertujuan untuk mengetahui kondisi dan bagaimana deportasi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap penduduk Chagossia yang akan ditinjau dari persepektif Hukum Pidana Internasional, kemudian bagaimana persepektif Hukum Pidana Internasional dalam kasus Deportasi Amerika Serikat terhadap penduduk Chagossia. Deportasi sendiri sebenarnya sudah banyak diketahui masyarakat setidaknya sudah sampai masuk di kalangan masyarakat tertentu, terutama para ahli hukum. Tertuliskan pada pasal 1 angka 36 dalam Undang – Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang pada intinya dimaksud mengenai deportasi adalah suatu tindakan paksa untuk mengeluarkan orang asing dari wilayah suatu Negara dengan adanya alasan bahwa orang asing tersebut didalam wilayahnya tidak dikehendaki oleh si Negara yang bersangkutan.

Kata Kunci: Deportasi, Chagossia, Hukum Pidana Internasional

PENDAHULUAN

Hukum Pidana Internasional dalam arti materill adalah berupa kaidah – kaidah hukum pidana internasional yang mengatur tentang kejahatan – kejahatan internasional yang pengaturannya dalam bentuk instrument – instrument hukum internasional, seperti perjanjian atau konvensi internasional yang substansinya mengenai suatu jenis kejahatan tertentu¹.

Pengertian dari deportasi sendiri sebenarnya sudah banyak diketahui masyarakat setidaknya sudah sampai masuk di kalangan masyarakat tertentu, terutama para ahli hukum. Tertuliskan pada pasal 1 angka 36 dalam Undang – Undang No. 6 Tahun 2011 tentang

¹ I Wayan Park Hiyana, *Hukum Pidana Internasional*. Hal. 23, Bandung : Yrama Widya 2015.

Keimigrasian yang pada intinya dimaksud mengenai deportasi adalah suatu tindakan paksa untuk mengeluarkan orang asing dari wilayah suatu Negara dengan adanya alasan bahwa orang asing tersebut didalam wilayahnya tidak dikehendaki oleh si Negara yang bersangkutan.

Hukum internasional tentunya mengatur hak-hak dan kewajiban setiap negara. Karena hal yang harus diurus hukum internasional ialah negara. Maka diirasa perlunya untuk mendapatkan suatu kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan suatu negara. Subjek hukum internasional sendiri ialah negara-negara, adanya pembentukan suatu negara diperlukan unsur-unsur konstitutif, yaitu adanya penduduk tetap, dan memiliki wilayah tertentu serta adanya Pemerintah, dan kedaulatan.

Amerika Serikat, disingkat dengan AS (Bahasa Inggris: United States of Amerika, disingkat USA atau U.S.A. atau United States, disingkat US atau U.S., harfiah: "Perserikatan Negara-Negara Bagian Amerika"), atau secara umum dikenal dengan Amerika saja adalah sebuah negara republik konstitusional federal yang terdiri dari lima puluh negara bagian dan sebuah distrik federal.²

Suku Chagossia (juga Îlois atau Penduduk Kepulauan Chagos)³ adalah kelompok etnis Afrika yang berasal dari budak Prancis yang dibawa ke Kepulauan Chagos , khususnya Diego Garcia , Peros Banhos , dan rangkaian pulau Salomon , pada akhir abad ke-18 .

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum bersama Undang-Undang serta kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara⁴. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia.

Perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Jika kita mengatakan seseorang "memiliki perspektif", yang kita maksudkan adalah dia memiliki pandangan hidup yang masuk akal.

Identifikasi Masalah

1. Mengapa suku Chagossia di deportasi dari Amerika Serikat?
2. Bagaimana persepektif hukum pidana internasional terhadap tindak Pemerintah Amerika Serikat kepada suku Chagossia?

² "United States". *The World Factbook*. CIA. September 30, 2009. Diarsipkan pada tahun tanggal 25 Desember 2018.

³ Pasir, Peter H. (10 Juli 2009). *Amerika Serikat dengan Inggris di Diego Garcia*.

⁴ Kurniawan Aris, 2024, *Pengertian Pemerintah*, Diakses pada link 25 Januari 2024.

<https://www.gurupendidikan.co.od/pemerintahan-adalah>

METODE PENELITIAN

Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah Metode Normatif yaitu dengan cara mengkaji dan menganalisis data-data sekunder dalam bidang Hukum yang berdasar dari peraturan perundang-undangan yang dimana menjadi dasar pedoman bagi Hukum Indonesia. Yakni menganalisis undang-undangan dan juga studi perpustakaan baik bahan hukum premier dan skunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal mula Deportasi penduduk Chagossia

Penduduk Chagossia (juga Îlois [il.wa] atau Penduduk Kepulauan Chagos)⁵ adalah kelompok etnis Indo-Afrika yang berasal dari budak Perancis yang dibawa ke Kepulauan Chagos , khususnya Diego Garcia , Peros Banhos , dan rangkaian pulau Salomon, pada akhir abad ke 18. Berdasarkan hukum internasional, mereka adalah penduduk asli kepulauan Chagos. Kebanyakan warga Chagossia sekarang tinggal di Mauritius dan Inggris setelah dipindahkan secara paksa oleh pemerintah Inggris pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an sehingga Diego Garcia, pulau tempat tinggal sebagian besar warga Chagos, dapat dijadikan sebagai lokasi pangkalan militer Amerika Serikat . Saat ini, tidak ada warga Chagos yang diizinkan tinggal di pulau Diego Garcia atau di mana pun di kepulauan Chagos, meskipun banyak pulau yang dulu mereka tinggal berjarak lebih dari 100 mil dari Diego Garcia.

Nenek moyang orang Chagossian sebagian besar adalah orang Afrika, khususnya dari Madagaskar , Mozambik , dan negara Afrika lainnya termasuk Mauritius . Ada juga sebagian besar keturunan India dan Melayu. Orang Prancis membawa beberapa orang ke Kepulauan Chagos sebagai budak dari Mauritius pada tahun 1786. Yang lainnya tiba sebagai nelayan, petani, dan pekerja perkebunan kelapa pada abad ke-19.

Orang Chagossia berbicara bahasa Kreol Chagossian , bahasa kreol berbasis di Prancis yang kosakatanya juga mencakup kata-kata yang berasal dari berbagai bahasa Afrika dan Asia dan merupakan bagian dari keluarga Kreol Bourbonnais . Kreol Chagossian masih dituturkan oleh beberapa keturunan mereka di Mauritius dan Seychelles . Orang Chagossian yang tinggal di Inggris berbicara bahasa Inggris . Beberapa menetap di kota Crawley di Sussex Barat , dan

⁵ Pasir, Peter H. (10 Juli 2009). *Amerika Serikat dengan Inggris di Diego Garcia*).

komunitas Chagossian di sana berjumlah sekitar 3.000 pada tahun 2016. Manchester juga memiliki komunitas Chagossian, termasuk artis Audrey Albert .

Pada tahun 2016, pemerintah Inggris menolak hak warga Chagos untuk kembali ke pulau-pulau tersebut setelah perselisihan hukum selama 45 tahun. Pada tahun 2019, Mahkamah Internasional mengeluarkan pendapat penasehat yang menyatakan bahwa Inggris tidak memiliki kedaulatan atas Kepulauan Chagos dan bahwa pemerintahan kepulauan harus diserahkan "secepat mungkin" kepada Mauritius .

Pada tahun 1793, ketika koloni pertama yang sukses didirikan di Diego Garcia, perkebunan kelapa didirikan di banyak atol dan pulau-pulau terpencil di nusantara. Awalnya para pekerja adalah orang Afrika yang diperbudak, tetapi setelah tahun 1840 mereka menjadi orang bebas, banyak di antara mereka adalah keturunan dari mereka yang diperbudak sebelumnya. Mereka membentuk budaya antar pulau yang disebut *Ilois* (kata Kreol Perancis yang berarti Penduduk Pulau).

Sekitar 60 tahun yang lalu, pemerintahan Inggris diam diam merencanakan, bersama dengan Amerika Serikat, untuk memaksa seluruh masyarakat pribumi, suku Chagossia meninggalkan rumah mereka d Kepulauan Chagos, pulau-pulau di samudra Hindida adalah bagian dari Maritius, yang saat itu merupakan koloni Inggris. Kedua pemerintahan sepakat bahwa pangkalan militer AS akan diunakan di Diego Garcia, pulau terbesar yang berpengaruh di Chagos, dan penduduk pulau itu akan disingkirkan. Pemerintahan Inggris memisahkan kepulauan Chagos dari Mauritius, menciptakan koloni baru di Afrika, British Indian Ocean Territory (BIOT).

Namum pmerintahan Inggris dan As memperlakukan mereka sebagai masyarakat tanpa hak, yang dapat mereka usir secara permanen dari tanah air mereka tanpa konsultasi atau kompensi untuk dijadikan pangkalan militer, dari tahun 1965 hingga 1973, Inggris dan AS mengusir seluruh penduduk Chagos dari seluruh pulau Chagos yang berpenghuni. Tidak hanya Diego Garcia tetapi juga Peros Banhos dan Salomo mereka meninggalkan mereka di Mauritius dimana mereka hidup di dalam kemiskinan.

Bertahun-tahun kemudian Inggris membayar melalui pemerintahan Mauritius sejumlah kecil kompensasi kepada beberapa warga Chagos dan beberapa decade kemudian memberikan kewarganegaraan kepada warga Chagos namun menolak untuk membahas reparasi kepada warga

⁶ Evers, Sandra; Kooy, Marry (2011), *Chagossian*, Diakses pada link 23 Januari 2024
https://en.wikipedia.org/wiki/Expulsion_of_the_Chagossians

Chagos, AS yang mendapatkan keuntungan dari pangkalan militer tersebut sejak saat itu secara konsisten menyangkal bertanggung jawab terhadap rakyat Chagossia.

Dalam beberapa dekade terakhir sebagian besar rencana rahasia pemindahan paksa telah terungkap melalui publikasi dokumen resmi, mereka tidak hanya mengungkapkan rencana tersebut namun juga rasisme terang-terangan yang dilakukan pejabat Inggris terhadap warga Chagos yang menyoroti sifat diskriminatif dari pelakuan mereka.

Warga chagos dari semua generasi telah berjuang dari semua generasi telah berjuang termasuk dalam proses legalitas di pengadilan domestic dan internasional untuk mengakui pelanggaran yang dilakukan terhadap mereka dan mengakui hak hak mereka terutama hak untuk kembali ke rumah, saat ini ribuan warga Chagossia tinggal diseluruh dunia sebagian besar di Mauritius Inggris dan Seychelles namun pemerintah Inggris dengan kelibatan AS masih mencegah mereka untuk masuk kembali dan tinggal secara permanan di tanah air mereka.

Pemrintahan Inggris sejak itu mengakui bahwa perlakuan terhadap warga Chagossia memalukan dan salah namun baik Inggris maupun AS menolak memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan terhadap warga Chagossia selama setengah abad terakhir dan kini menentang kepulauan mereka dengan alasan biaya dan keamanan.⁷

Pemindahan paksa warga Chagos dan pelanggaran yang terus berlanjut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh kekuatan koonial terhaap masyarakat adat, peerintahan colonial Inggris di kepulauan Chagos tidak seperti sebagian besar koloni lainnya di Afrika tidak berakhir pada tahun 196-an dan terus berlanjut dengan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat Chagos, pemerintah olonial ini dibangun di atas rasisme sistematis dan diskriminasi etnis dan ras dalam perlakuan terhadap orang Chagos.

Pada bulan April 2006, Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Sirkuit Distrik Columbia menolak gugatan Louis Olivier Bancoult dan warga Chagoss lainnya, dan menemukan bahwa klaim mereka adalah pertanyaan politik yang tidak dapat dibenarkan , yaitu pertanyaan yang tidak dapat ditangani oleh pengadilan AS karena memang demikian. tugas Kongres untuk mengatasinya secara legislatif.

⁷ Louis Marcel Humbert, born in Peros Banhos, Chagos in 1955, speaking in April 2022, Diakses pada link 25 Januari 2024 <https://www-hrw-org.translate.goog/report/2023/02/15/thats-when-nightmare-started/uk-and-us-forced-displacement-chagossians-and? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc>

Pada tanggal 11 Mei 2006, masyarakat Chagos memenangkan kasus mereka di Pengadilan Tinggi di Inggris, yang menyatakan bahwa mereka berhak untuk kembali ke Kepulauan Chagos. Masih harus dilihat bagaimana keputusan ini dapat diterapkan dalam praktiknya. Namun, pada bulan Juni 2006 pemerintah Inggris mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi terhadap keputusan Pengadilan Tinggi. Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran mengajukan argumen berdasarkan perlakuan terhadap warga Kanada Jepang setelah serangan di Pearl Harbor .

Setelah Pengadilan Banding menguatkan keputusan Pengadilan Tinggi, pemerintah Inggris berhasil mengajukan banding ke Komite Yudisial House of Lords . Pada tanggal 22 Oktober 2008, Law Lords mengambil *keputusan* atas banding yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri dan Persemakmuran , David Miliband . Mereka memenangkan Pemerintah dalam putusan 3–2, mengakhiri proses hukum di Inggris dan memupus harapan penduduk pulau untuk kembali. Pada tahun 2016, pemerintah Inggris menolak hak warga Chagos untuk kembali ke pulau-pulau tersebut setelah perselisihan hukum selama 45 tahun.

Persepektif Hukum Pidana Internasional Terhadap Tindak Pemerintah Amerika Serikat kepada Suku Chagossia

Pada tahun 2019, Mahkamah Internasional mengeluarkan pendapat penasehat yang menyatakan bahwa Inggris tidak memiliki kedaulatan atas Kepulauan Chagos dan bahwa pemerintahan di kepulauan tersebut harus diserahkan "secepat mungkin" kepada Mauritius. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian memutuskan untuk memberi Inggris batas waktu enam bulan untuk memulai proses penyerahan pulau-pulau tersebut.

Pada bulan April 2010, Pemerintah Inggris—khususnya, diplomat Inggris Colin Roberts , bertindak atas instruksi David Miliband —mendirikan cagar alam laut di sekitar Kepulauan Chagos yang dikenal sebagai Kawasan Konservasi Laut Chagos . Penunjukan tersebut terbukti kontroversial karena keputusan tersebut diumumkan pada saat Parlemen Inggris sedang dalam masa reses.

Pada tanggal 1 Desember 2010, bocoran kabel diplomatik Kedutaan Besar AS di London sejak tahun 2009 mengungkap perhitungan Inggris dan AS dalam menciptakan cagar alam laut. Pertukaran kabel antara Penasihat Politik AS Richard Mills dan Direktur Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran Inggris Colin Roberts, di mana Roberts "menegaskan bahwa pembangunan taman laut, pada dasarnya, akan membayar klaim pemukiman kembali para mantan penduduk kepulauan tersebut". Richard Mills menyimpulkan:

Membangun cagar alam laut mungkin, seperti yang dinyatakan oleh Roberts dari FCO, merupakan cara jangka panjang yang paling efektif untuk mencegah mantan penghuni Kepulauan Chagos atau keturunan mereka untuk bermukim kembali di [Wilayah Britania di Samudra Hindia]. Namun, kabel tersebut juga menyebutkan bahwa "ada proposal (untuk taman laut) yang dapat menyediakan pekerjaan bagi sipir Chagossians". Pada tahun 2018, tidak ada pekerjaan seperti itu. Kabel (ID referensi "09LONDON1156") diklasifikasikan sebagai rahasia dan "tidak ada orang asing", dan bocor sebagai bagian dari cache Cablegate .

Berbekal pengungkapan WikiLeaks , warga Chagossia mengajukan banding, meminta keputusan bahwa cagar alam tersebut secara tidak sah bertujuan untuk mencegah mereka kembali ke rumah. Meskipun tentara Angkatan Darat Amerika Serikat Chelsea Manning telah ditangkap hampir tiga tahun sebelumnya karena kebocoran tersebut, pemerintah Inggris merasa tidak dapat mengkonfirmasi ke pengadilan bahwa dokumen yang bocor tersebut adalah asli. Pengadilan menjelaskan dengan jelas bahwa ketidakmampuan pemerintah untuk melakukan konfirmasi disebabkan oleh dua alasan: pertama, untuk melindungi diri dari tuduhan bahwa pemerintah menciptakan cagar alam untuk mencegah penduduk pulau kembali ke rumah mereka dan, kedua, karena alasan yang tidak diketahui. Ketakutan bahwa pemerintah AS akan marah jika kabel tersebut diakui asli. Meskipun isi kabelnya diketahui—"sebuah taman laut, pada dasarnya, akan membayar klaim pemukiman kembali para mantan penduduk kepulauan itu"—Roberts membantah, ketika ditanyai di pengadilan, bahwa ada "motif tersembunyi" di baliknya. pendirian cadangan tersebut. Lord Justice Richards dan Mr. Justice Mitting kemudian menolak untuk menerima dokumen tersebut sebagai bukti, dengan menyatakan bahwa hal tersebut akan melanggar hak istimewa diplomatik. *The Guardian* menggambarkan keputusan mereka memiliki "konsekuensi luas" dan "kemunduran parah terhadap penggunaan materi yang diperoleh dari kebocoran atau pelapor". Pada bulan Juni 2013, sepasang hakim menolak banding yang diajukan oleh Chagossians, memutuskan bahwa cadangan tersebut sesuai dengan hukum UE.

Internasional Criminal Court (ICC) adalah Lembaga internasional yang mengatur berbagai macam kejahatan internasional seperti kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan agresi dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Lembaga Internasional Criminal Court (ICC) tidak hanya berkhusus mengatasi mengenai deportasi, karena lebih berfokus pada kejahatan perindividu atas kejahatan yang mencakup dalam lingkungan ICC.

Namun dalam masalah kemanusiaan, yang mencakup deportasi paksa atau pengusiran massal. Internasional Criminal Court (ICC) akan mempertimbangkan masalah tersebut apabila telah menjadi suatu kejahatan individu yang melibatkan kejahatan terhadap kemanusiaan. Maka bisa di selesaikan dihadapan Internasional Criminal Court (ICC).

Internasional Criminal Court (ICC) tidak akan menggantikan yuridiksi pengadilan Internasional. Maka dari itu, jika terjadi tindakan kejahatan deportasi Internasional Criminal Court (ICC) berhak mengambil tindakan – tindakan untuk menegakkan kejahatan yang terjadi seperti deportasi.

PENUTUP

Penduduk Chagossia (juga Îlois [il.wa] atau Penduduk Kepulauan Chagos) adalah kelompok etnis Indo-Afrika yang berasal dari budak Perancis yang dibawa ke Kepulauan Chagos , khususnya Diego Garcia , Peros Banhos , dan rangkaian pulau Salomon , pada akhir abad ke 18. Berdasarkan hukum internasional, mereka adalah penduduk asli kepulauan Chagos. Kebanyakan warga Chagossia sekarang tinggal di Mauritius dan Inggris setelah dipindahkan secara paksa oleh pemerintah Inggris pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an sehingga Diego Garcia, pulau tempat tinggal sebagian besar warga Chagos, dapat dijadikan sebagai lokasi pangkalan militer Amerika Serikat . Saat ini, tidak ada warga Chagos yang diizinkan tinggal di pulau Diego Garcia atau di mana pun di kepulauan Chagos, meskipun banyak pulau yang dulu mereka tinggal berjarak lebih dari 100 mil dari Diego Garcia.

Internasional Criminal Court (ICC) adalah Lembaga internasional yang mengatur berbagai macam kejahatan internasional seperti kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan agresi dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Lembaga Internasional Criminal Court (ICC) tidak hanya berkhusus mengatasi mengenai deportasi, karena lebih berfokus pada kejahatan perindividu atas kejahatan yang mencakup dalam lingkungan ICC.

DAFTAR PUSTAKA

I Wayan Park Hiyantai, *Hukum Pidana Internasional*. Hal. 23, Bandung : Yrama Widya 2015.

“United States”. *The World Factbook*. CIA. September 30, 2009. Diarsipkan pada tahun tanggal 25 Desember 2018.

Pasir, Peter H. (10 Juli 2009). *Amerika Serikat dengan Inggris di Diego Garcia*).

Kurniawan Aris, 2024, *Pengertian Pemerintah*, Diakses pada link 25 Januari 2024. <https://www.gurupendidikan.co.od/pemerintahan-adalah>

Pasir, Peter H. (10 Juli 2009). *Amerika Serikat dengan Inggris di Diego Garcia*).

Evers, Sandra; Kooy, Marry (2011), *Chagossian*, Diakses pada link 23 Januari 2024 https://en.wikipedia.org/wiki/Expulsion_of_the_Chagossians

Louis Marcel Humbert, born in Peros Banhos, Chagos in 1955, speaking in April 2022, Diakses pada link 25 Januari 2024 <https://www-hrw-org.translate.goog/report/2023/02/15/thats-when-nightmare-started/uk-and-us-forced-displacement-chagossians-and? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc>